



BAB II KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik skripsi serta bagaimana kaitannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pula penjelasan mengenai apa yang dikenal dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris, leverage, *media exposure*, pengungkapan, GRI, serta laporan keuangan dan tahunan. Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Agar bermanfaat, maka penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Legitimasi

Menurut O'Donovan (2002), berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan hidup (*going concern*).

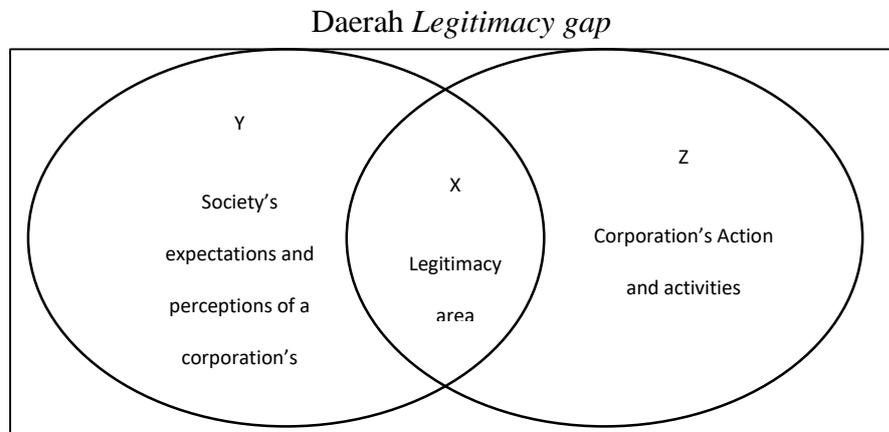
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



O'Donovan (2002) memberikan ilustrasi posisi legitimasi dan senjangan

legitimasi antara perusahaan dan *stakeholder*, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini :

Gambar 2.1



Sumber: O'Donovan (2002)

Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa wilayah X merupakan sebuah kesesuaian (*congruence*) antara aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat yang sesuai dengan nilai sosial dan normal. Sementara wilayah Y dan Z merupakan ketidaksesuaian (*incongruence*) antara aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap persepsi masyarakat.

Legitimasi merupakan sebuah keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan dalam tindakan perusahaan. Menurut teori legitimasi, pengungkapan tanggung jawab sosial dalam masyarakat menjadi strategi perusahaan untuk memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat. Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga apa yang diharapkan masyarakat kepada perusahaan dapat tersampaikan kepada perusahaan dan perusahaan dapat melakukan tindakannya secara terlegitimasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Stakeholder

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pengertian pemangku kepentingan (*stakeholder*) menurut David (2008: 28):

“Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.”

Dari definisi tersebut dalam teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para pemangku kepentingan, sehingga aktivitas perusahaan pun ditentukan atas pertimbangan dari para pemangku kepentingan. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi pemangku kepentingan, semakin besar pula kecendrungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para pemangku kepentingan (Rokhlinasari, 2015).

3. Teori Agency

Teori agensi menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab agent maupun pemilik perusahaan diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Teori agensi mempunyai asumsi manajemen bertanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik namun disisi lain manajemen juga menginginkan kesejahteraannya (*self interest*). Sedangkan *principal* sebagai (pemilik modal) menginginkan return yang maksimal sehingga agen akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan laba yang tinggi meski sering kali menggunakan tindakan yang tidak etis (*earnings management*). *Earnings management* yang dilakukan agen dapat menyebabkan turunnya kualitas laba dan nilai perusahaan (Widjaja dan Maghviroh, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Rokhlinasari (2015), Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik

dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingan terhadap perusahaan.

4. Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1986) mengajukan paradigma baru dalam penelitian akuntansi yang dikenal dengan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) dan menyatakan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi dan karakteristik yang mendasari akuntansi keuangan tidak terlepas dari keberadaan perusahaan yang pada dasarnya merupakan suatu kumpulan dari kontrak. Dalam teori positif dibahas tiga hal, yaitu menjelaskan, mengawasi dan memprediksi.

Scott (2012: 284) menyebutkan bahwa:

“positive accounting theory is concerned with predicting such actions as the choices of accounting policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards”.

Teori akuntansi positif berhubungan dengan prediksi suatu keputusan dalam prinsip akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer akan memberikan respon terhadap standar akuntansi yang baru. Teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa manajer mempunyai sifat yang rasional seperti investor dan manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Watts and Zimmerman (1986) dalam Scott (2012: 287-288) menyatakan terdapat tiga hipotesis dari teori akuntansi positif, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) *The Bonus Plan Hypothesis*

Manajer perusahaan akan memilih prosedur akuntansi yang melaporkan pendapatan dari masa yang akan datang ke periode berjalan. Manajer menginginkan bonus yang tinggi, jika bonus bergantung pada laba yang dilaporkan, maka manajer akan memaksimalkan bonus mereka dengan melaporkan pendapatan setinggi mungkin. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar dapat mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer memilih metode taksiran akuntansi yang tersedia dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapat setiap tahun. Hal ini yang kemudian mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus.

(2) *The Debt Covenants Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam perjanjian hutang. Perusahaan memiliki rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi dan keputusan bisnis yang keliru, akibatnya terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) *The Political Cost Hypothesis*

Perusahaan yang besar dengan tingkat laba yang tinggi lebih banyak dijadikan obyek implementasi peraturan maupun kebijakan pemerintah, seperti pengenaan pajak penghasilan tinggi, diwajibkan untuk memenuhi standar kinerja yang lebih tinggi seperti tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sebagainya. Makin besar suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut harus mengikuti aturan maupun kebijakan yang berlaku, sehingga koskuensinya ialah memunculkan biaya agen (*agency cost*).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat bekerjasama dengan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat sekitar dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang lebih baik bagi bisnis maupun pengembangan (Miftah dan Arifin, 2013).

Menurut Johnson and Johnson (2006) dalam Hadi (2014: 46), tanggung jawab sosial perusahaan adalah :

“Corporate Social Responsibility is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society”

Dari definisi tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikatakan sebagai konsep bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* (Nurlela dan Islahuddin 2008).

Konsep *triple bottom lines* menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki tiga elemen penting yaitu (Purwanto, 2011):

- (1) Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *Profit*, yaitu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
- (2) Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *People*, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan masyarakat.
- (3) Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *Planet*, yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

b. Keterlibatan Perusahaan Dalam Kegiatan Sosial

Menurut Harahap (2015: 403), ada tiga pandangan atau model yang menggambarkan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, yaitu:

(1) Model Klasik

Menurut model ini, perusahaan tidak perlu memikirkan efek sosial yang ditimbulkan perusahaannya dan tidak perlu memikirkan usaha untuk memperbaiki patologi sosial. Itu bukan urusan bisnis, tetapi urusan pemerintah.

(2) Model Manajemen

Menurut model ini, perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan tersendiri. Manajer sebagai orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipercayai oleh pemilik modal menjalankan perusahaan untuk kepentingan bukan saja pemilik modal, tetapi juga mereka yang terlibat langsung dengan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, manajer sebagai tim yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mengingat ketergantungan dengan pihak lain (masyarakat) yang juga punya andil dalam pencapaian tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan dividen bagi pemilik modal.

(3) Model Lingkungan Sosial

Model ini menekankan bahwa perusahaan meyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan (bersumber) dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan teori atau model klasik. Konsekuensinya perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan patologi sosial yang berada di lingkungannya. Kalau model klasik mempunyai tujuan utama untuk menjahterakan pemilik modal dan model manajemen menjahterakan manajemen, dalam model ini perusahaan harus memperluas tujuan yang harus dicapainya yaitu menyangkut kesejahteraan sosial secara umum. Dengan demikian, dalam memilih proyek yang akan dibangun, di samping memperhatikan persentasi laba, juga harus memperhatikan keuntungannya dan kerugian yang mungkin akan diderita oleh masyarakat.

c. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam Harahap (2015: 406) mengemukakan tiga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(1) *Corporate philanthropy*

Tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

(2) *Corporate responsibility*

Kegiatan pertanggungjawaban itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan.

(3) *Corporate policy*

Tanggung jawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

d. Alasan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Harahap (2015: 407), ada beberapa alasan agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, yaitu:

- (1) Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
- (2) Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
- (3) Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, karyawan, investor, dan lain-lain.
- (4) Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.

- (5) Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga mendapat simpati masyarakat.
- (6) Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.
- (7) Mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap perusahaan yang kadang-kadang suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari.
- (8) Membantu kepentingan nasional, seperti konversi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lain-lain.

e. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan (Susiloadi 2008).

Menurut Kotler dan Lee (2005), beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah:

- (1) Peningkatan penjualan dan *marketing share*.
- (2) Memperkuat *brand positioning*.
- (3) Meningkatkan citra perusahaan.
- (4) Menurunkan biaya operasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisa keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

f. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial

David (2008: 14) menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tiga, yaitu:

(1) *Sustainability*

Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya dimasa depan. Keberlanjutan ini memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya tetap memperhatikan dan memperhitungkan generasi masa depan.

(2) *Accountability*

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak eksternal dan internal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun *image* dan *network* terhadap pemangku kepentingan.

(3) *Transparency*

Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak terhadap lingkungan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan I (2015: 2):

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan.”

Menurut Harahap (2015: 205), mengemukakan bahwa Laporan keuangan merupakan output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Jadi laporan keuangan adalah suatu ringkasan transaksi transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang meliputi neraca laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang disajikan dalam laporan arus kas maupun arus dana dan berbentuk laporan-laporan yang dipertanggungjawabkan oleh manajemen untuk dapat menjadi informasi oleh para petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan, maupun masyarakat atas kinerja perusahaan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2015: 3), tujuan laporan keuangan adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomik.”





Menurut Suwardjono (2014: 145), tujuan pelaporan keuangan adalah ke arah mana segala upaya dan tindakan dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statemen keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Pada gilirannya pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Dengan demikian diharapkan tujuan yang lebih luas (tujuan ekonomik dan sosial negara) akan tercapai pula.

7. Laporan Tahunan

Laporan tahunan menurut kamus Bank Sentral Republik Indonesia (BI) adalah catatan tahunan yang berisi gambaran kondisi operasional perusahaan atau bank biasanya, terdiri atas neraca dan laporan laba-rugi serta termasuk penjelasan atas operasi perusahaan, biasanya juga dilampiri laporan hasil audit (*annual report*).

8. Pengungkapan

a. Pengertian Pengungkapan

Dalam Suwardjono (2014: 578), pelaporan keuangan adalah bagian dari pengungkapan. Penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan merupakan langkah pengungkapan dalam proses akuntansi yang telah dilakukan.

Dalam Suwardjono (2014: 578) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statements”

Pengungkapan berarti menyediakan informasi dalam laporan keuangan, yang meliputi laporan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan tambahan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal. Secara sederhana, pengungkapan dapat dikatakan sebagai informasi yang diberikan sebagai lampiran/pelengkap di dalam laporan keuangan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Tujuan Pengungkapan

Tujuan pengungkapan menurut Suwardjono (2014: 580) adalah sebagai berikut :

(1) Tujuan melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Tujuan informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

(3) Tujuan kebutuhan khusus.

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Secara sederhana, fungsi dan tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi dan melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga dapat mencapai tujuan pelaporan keuangan. Fungsi dan tujuan pengungkapan ditujukan untuk melindungi, memberikan informasi, dan membatasi pengungkapan sesuai kebutuhan khusus.

c. Tingkatan Pengungkapan

Ada tiga tingkatan dalam pengungkapan dalam Suwardjono (2014: 581), yaitu:

(1) *Adequate Disclosure* (pengungkapan yang memadai)

Merupakan tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Fair or Ethical Disclosure* (pengungkapan yang wajar atau etis)

Merupakan tingkat yang harus di capai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi.

(3) *Full Disclosure* (pengungkapan yang penuh)

Merupakan pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Tingkatan penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan berada pada tingkatan *fair disclosure*, karena pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan agar semua pihak mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara adil yang menguntungkan semua pihak tanpa terkecuali.

d. Jenis Pengungkapan

Ada dua jenis pengungkapan menurut Suwardjono (2014: 583), yaitu :

(1) Pengungkapan wajib (*mandated disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang sesuai dengan syarat standar akuntansi yang berlaku dan perusahaan diharuskan untuk melakukan pengungkapan wajib. Dalam hal ini peraturan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

(2) Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan di luar apa yang diwajibkan karena manajemen memiliki pilihan bebas dalam



memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang perlu untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunannya.

e. Metode Pengungkapan

Pengungkapan meliputi seluruh proses pelaporan keuangan. Metode pengungkapan berkaitan dengan bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan berdasarkan Suwardjono (2014:591-600) antara lain:

(1) Pos statemen keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian. Jenis statement meliputi neraca, statement rugi-laba, dan statement perubahan ekuitas, dan statement aliran kas.

(2) Catatan kaki (catatan atas statement keuangan)

Catatan kaki (*footnotes*) atau catatan atas statement keuangan (*notes to financial statements*) adalah metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan.

Catatan kaki harus digunakan dengan penuh kearifan karena memang ada keunggulan dan kelemahan. Beberapa keunggulan catatan kaki adalah:

- (a) Mengungkapkan informasi non kuantitatif tanpa harus mengganggu penyajian utama dalam statement keuangan



- (b) Mengungkapkan kualifikasi (pengecualian) dan pembatasan pos-pos tertentu dalam statement keuangan
- (c) Mengungkapkan rincian pos-pos tertentu yang dianggap penting tanpa mendistraksi jumlah total suatu pos atau tanpa mengganggu susunan penyajian pos-pos dalam statement
- (d) Mengungkapkan hal-hal yang bersifat kuantitatif atau deskriptif yang tidak memenuhi kriteria pengakuan tetapi penting untuk disampaikan atau yang tidak mempunyai arti penting sekunder
- (e) Mempertahankan statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan dengan ringkas dan jelas meskipun catatan kaki merupakan bagian integralnya

(3) Penjelasan dalam kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi, makna suatu istilah, ketermasukannya suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang disajikan dalam tanda kurung. Pengungkapan dalam bentuk tanda kurung lebih merupakan konvensi daripada sebagai ketentuan standar akuntansi.

(4) Penggunaan istilah teknis (*terminology*)

Istilah teknis dan strategik merupakan bagian dari pengungkapan. Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, atau subjudul. Penyusun standar banyak menciptakan istilah-istilah teknis untuk merepresentasikan suatu realita atau makna dalam akuntansi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Lampiran

Statement keuangan sebenarnya merupakan salah satu bentuk ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategik. Statement keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen (internal). Rincian, statement tambahan (*supplementary statements*), daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan statement utama.

(6) Komunikasi manajemen

Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau nonfinansial yang dirasa penting untuk diketahui statement melalui berbagai cara. Wawancara manajer dengan wartawan (jumpa pers atau *press release*) merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan diskusi dan analisis manajemen.

(7) Catatan laporan auditor

Pengungkapan auditor dianggap penting dan bermanfaat adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi auditor untuk menerbitkan laporan auditor bentuk standar. Syarat-syarat penerbitan laporan auditor adalah:

- (a) Semua statement (neraca, statement laba-rugi, statement laba ditahan, dan statement aliran kas) telah masuk dalam seperangkat penuh statement keuangan yang diaudit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Ketiga standar umum standar pengauditan berterima umum (StaPBU) telah dilaksanakan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan penugasan audit.
- (c) Statement keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).
- (d) Tidak terdapat keadaan-keadaan yang menuntut tambahan paragraf penjelas atau modifikasi susunan kalimat laporan audit.

9. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

9. Global Reporting Initiative

a. Definisi GRI

Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, GRI adalah sebuah organisasi nirlaba yang bekerja ke arah ekonomi global yang berkelanjutan dengan memberikan panduan pelaporan berkelanjutan. GRI telah merintis dan mengembangkan kerangka komprehensif pelaporan berkelanjutan yang banyak digunakan di seluruh dunia. Kerangka ini memungkinkan semua organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, kinerja sosial dan pemerintahan (empat bidang utama berkelanjutan).

Kerangka pelaporan, yang meliputi pedoman pelaporan, pedoman sektor dan sumber daya lain, memungkinkan adanya transparansi organisasi yang lebih besar tentang ekonomi, kinerja lingkungan, sosial dan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas ini membangun kepercayaan pemangku kepentingan dalam organisasi, dan dapat menyebabkan banyak manfaat lainnya. Ribuan organisasi, dari semua ukuran dan sektor, menggunakan kerangka GRI untuk memahami dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Indikator GRI Guidelines

Salah satu panduan pelaporan yang banyak digunakan sebagai standar pelaporan saat ini oleh perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan adalah *Sustainability Reporting Guidelines* yang di bual oleh GRI. GRI dan pedoman berkelanjutan telah membentuk kemitraan kolaboratif dengan Program Lingkungan PBB, Global Compact PBB dan Prakarsa Piagam Bumi. Pada tanggal 22 Mei 2013 yang lalu GRI mengeluarkan pedoman yang baru yaitu *G4 Guidelines*.

Berikut penjelasan mengenai indikator *G4 Guidelines* yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative (2013: 47)*:

Tabel 2.1
Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI

Indikator Kinerja: Ekonomi	
Kategori 1: Ekonomi	
Aspek: Kinerja Ekonomi	
EC1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan yang didistribusikan yaitu pendapatan, biaya operasional, upah dan tunjangan karyawan, pembayaran kepada pemodal, pembayaran kepada pemerintah, investasi masyarakat.
EC2	Implikasi financial dan reisko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti.
EC4	Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah
Aspek : Keberadaan Pasar	
EC5	Rasio tingkat upah awal (standar) dibandingkan dengan upah minimum regional berdasarkan wilayah kerja.
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan
Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC7	Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur dan jasa untuk kepentingan publik.
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
Aspek : Praktik Pengadaan	
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.
Indikator Kinerja : Lingkungan	
Kategori 2 : Lingkungan	
Aspek : Bahan	

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



EN1	Bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volume.
EN2	Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang (<i>recycle</i>).
Aspek : Energi	
EN3	Pemakaian energi langsung berdasarkan sumber energi.
EN4	Konsumsi energi di luar organisasi.
EN5	Intensitas energi.
EN6	Pengurangan konsumsi energi.
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa.
Aspek : Air	
EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh penarikan air.
EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan lagi.
Aspek : Keanekaragaman Hayati	
EN11	Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewa atau dikelola berhadapan langsung dengan area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar area yang dilindungi.
EN12	Deskripsi tentang dampak aktivitas, produk dan jasa pada keanekaragaman hayati di area yang dilindungi dan area yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi.
EN13	Habitat yang dilindungi dan dijaga
EN14	Jumlah spesies IUCN <i>red list</i> dan daftar spesies konservasi nasional dengan habitat di daerah yang terpengaruh oleh operasi, dengan tingkat resiko kepunahan.
Aspek : Emisi	
EN15	Emisi gas rumah kaca langsung.
EN16	Emisi gas rumah kaca energy tidak langsung.
EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya.
EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca.
EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca.
EN20	Emisi bahan perusak ozon.
EN21	NO, SO dan emisi udara lainnya yang signifikan berdasarkan jenis dan bobotnya.
Aspek : Efluen dan Limbah	
EN22	Pembuangan total air berdasarkan kualitas dan tujuan.
EN23	Total bobot ilmiah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
EN24	Total jumlah dan volume buangan yang signifikan.
EN25	Berat sampah berbahaya yang dipindah, diimpor, diekspor atau diperlakukan sesuai <i>Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII</i> , dan persentase sampah pindahan yang dikirim internasional dengan kapal.
EN26	Identitas, ukuran, status dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati dari dan habitat lain yang dipengaruhi secara signifikan oleh pembuangan sampah perusahaan.
Aspek : Produk dan Jasa	
EN27	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan jasa, dan tingkat dampak mitigasi.
EN28	Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang diklaim berdasarkan kategori.
Aspek : Kepatuhan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



EN29	Besarnya denda keuangan dan sanksi lain karena tidak mematuhi peraturan lingkungan.
Aspek : Transportasi	
EN30	Pengaruh pemindahan produk dan bahan baku yang digunakan perusahaan dan pemindahan tenaga kerja terhadap kondisi lingkungan.
Aspek : Lain-lain	
EN31	Total investasi dan pengeluaran lain untuk melindungi/memperbaiki lingkungan berdasarkan jenisnya.
Aspek : Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	
EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	
EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Indikator Kinerja : Sosial	
Kategori 3 : Praktik Tenaga Kerja dan Kenyamanan Bekerja	
Aspek : Pekerjaan	
LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.
LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
LA3	Tingkat kembali kerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
Aspek : Hubungan Industrial	
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
LA5	Persentase total tenaga kerja yang menjadi wakil dalam komite keselamatan dan kesehatan kerja yang berfungsi membantu dan memberi saran dalam menentukan program keselamatan dan kesehatan kerja.
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan	
LA9	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan jenis/kategori karyawan.
LA10	Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola akhir karir.
LA11	Presentase karyawan yang menerima laporan kinerja dan perkembangan karir.
Aspek : Keragaman dan Kesamaan Peluang	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LA12	Komposisi pengelola karyawan (<i>governance</i>) dan rincian karyawan per kategori menurut jenis kelamin, kelompok umur, anggota kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lainnya.
Aspek : Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	
LA13	Rasio gaji pokok laki-laki dan perempuan berdasarkan kategori karyawan menurut lokasi operasional yang signifikan.
Aspek : Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	
LA14	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.
LA15	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	
LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Kategori 4 : Hak Asasi Manusia	
Aspek : Investasi	
HR1	Persentase dan total perjanjian investasi yang dirancang dengan mempertimbangkan isu hak asasi manusia.
HR2	Total jam pelatihan pekerja yang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang relevan dengan kegiatan kerja termasuk persentase karyawan yang mengikuti pelatihan.
Aspek : Non-diskriminasi	
HR3	Total kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi dan tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.
Aspek : Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Sama	
HR4	Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan dalam membentuk kebebasan berserikat dan berdiskusi bersama serta dukungan perusahaan terhadap hal tersebut.
Aspek : Pekerja Anak	
HR5	Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan/ukuran yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.
Aspek : Tenaga Kerja Wajib dan Paksa	
HR6	Kegiatan yang dapat menimbulkan resiko munculnya paksaan/tekanan kepada pekerja dan usaha yang dilakukan untuk menghilangkan munculnya kejadian tersebut.
Aspek : Praktik Keamanan	
HR7	Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Aspek : Hak Adat	
HR8	Total kejadian pelanggaran yang melibatkan hak-hak kaum pribumi (penduduk setempat) dan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengatasinya.
Aspek : Asesmen	
HR9	Jumlah total dan presentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
Aspek : Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
HR10	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	
HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan.
Kategori 5 : Masyarakat	
Aspek : Masyarakat Lokal	
SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, assesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan.
SO2	Operasi dengan dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
Aspek : Anti-Korupsi	
SO3	Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki potensi korupsi.
SO4	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan program anti korupsi.
SO5	Tindakan yang dilakukan ketika terjadi kasus korupsi.
Aspek : Kebijakan Publik	
SO6	Total nilai bantuan keuangan dan kontribusi lain kepada partai politik, politisi dan institusi terkait.
Aspek : Anti Persaingan	
SO7	Jumlah tindakan hukum untuk perilaku anti persaingan, penentang monopoli industri, dan praktik monopoli beserta hasilnya.
Aspek : Kepatuhan	
SO8	Denda keuangan dan sanksi lainnya karena tidak mematuhi peraturan/regulasi yang berlaku.
Aspek : Assesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat	
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak masyarakat.
SO10	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Aspek : Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	
SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Kategori 6 : Tanggung Jawab Produk	
Aspek : Kesehatan dan Keamanan Pelanggan	
PR1	Perbaikan yang dilakukan perusahaan atas dampak kesehatan dan keamanan dari produk/jasa yang dihasilkan perusahaan.
PR2	Jumlah ketidakpatuhan perusahaan pada regulasi kesehatan dan keamanan produk yang dihasilkan.
Aspek : Label pada Produk dan Jasa	
PR3	Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan persentase jumlah produk dan jasa yang mematuhi pengungkapan tersebut.
PR4	Jumlah ketidakpatuhan pada regulasi tentang pengungkapan informasi produk dan pemberian label produk/jasa.
PR5	Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey yang mengukur kepuasan konsumen.
Aspek : Komunikasi Pemasaran	
PR6	Program yang berhubungan dengan aspek hukum, standar komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi dan sponsor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PR7	Jumlah kejadian yang menunjukkan ketidakpatuhan pada regulasi dan aturan lain yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi, dan sponsor berdasarkan hasilnya.
Aspek : Keleluasaan Pribadi Pelanggan	
PR8	Total jumlah keluhan sehubungan dengan hilangnya <i>privacy</i> konsumen dan hilangnya data konsumen.
Aspek : Kepatuhan	
PR9	Denda keuangan karena tidak mematuhi peraturan hukum dan regulasi berkaitan dengan produk/jasa yang dihasilkan.

Sumber : *Global Reporting Initiative (GRI Guidelines G4, 2013)*

10. Ukuran Perusahaan

Menurut Sari (2012) ukuran perusahaan (size) merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar biasanya cenderung lebih banyak menungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil.

Menurut Cowen *et. al.* (1987) dalam Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat akan lebih memperhatikan dari sisi transparansi informasi dan program sosial yang dilakukan sehingga hal tersebut dapat memenuhi keinginan para pemangku kepentingan.

11. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha perusahaan selama satu tahun. Benardi, dkk (2009) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab manajer ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan para investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula. Didasarkan dengan tujuan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menarik investor, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memberikan signal melalui pengungkapan laporan keuangan yang lebih detail mengenai kondisi perusahaan.

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang (Fahmi, 2015). Profitabilitas yang tinggi juga mendorong para pemangku kepentingan akan transparansi informasi yang harusnya dilakukan perusahaan khususnya dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

12. Dewan Komisaris

Komisaris merupakan bagian perusahaan yang memegang fungsi pengawasan. Komisaris terdiri dari beberapa orang, sehingga lebih dikenal dengan dewan komisaris. Dewan komisaris (*Board of Commissioners*) adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan tersebut maupun usahanya dan memberi nasehat kepada direksi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu tetapi untuk kepentingan perseroan (Fahmi, 2015).

Dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, dewan komisaris bertanggung jawab terhadap rapat umum pemegang saham (RUPS). Pada dasarnya semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi, seperti informasi sosial juga akan semakin besar.

13. *Leverage*

Leverage adalah penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun sumber pembiayaan jangka panjang yang akan menimbulkan suatu efek. Rasio *leverage* menunjukkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Hal ini berarti rasio *leverage* ini menunjukkan kemampuan kekayaan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajibannya jika perusahaan dilikuidasi.

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) semakin tinggi *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi untuk menghindari sorotan *debtholder*. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

Seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 2 bahwa dalam pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

14. *Media Exposure*

Pengungkapan media merupakan alat bagi perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi dan prospek perusahaan, Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya secara efektif (Fahmi, 2015). Fungsi komunikasi menjadi sangat pokok dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Pengkomunikasian tanggung jawab sosial perusahaan melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal inilah yang menjadi bagian pada proses membangun dan membentuk norma yang diterima dan legitimasi praktik tanggung jawab sosial perusahaan (Nur, 2012).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ternyata memberikan gambaran unik dan hasil yang berbeda-beda yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ikhtisar Penelitian

1. Ikhtisar Penelitian Eddy Rismanda Sembiring

Nama Peneliti	Eddy Rismanda Sembiring
Judul	Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta
Tahun Penelitian	2005
Objek Penelitian	Semua Perusahaan yang tercatat (<i>go-public</i>) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2002 seperti yang tercantum dalam <i>Indonesian Capital Market Directory 2002</i> .
Data yang diteliti	<i>Annual Report 2002</i>
Alat Uji Statistik	Model regresi berganda
Variabel Dependen	<i>Corporate Social Responsibility disclosure</i>
Variabel Independen	Profitabilitas, <i>profile</i> , ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i>
Hasil Penelitian	Size perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

2. Ikhtisar Penelitian Marzully Nur dan Denies Priantinah.

Nama Peneliti	Marzully Nur dan Denies Priantinah
Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori <i>High Profile</i> Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)
Tahun Penelitian	2012
Objek Penelitian	Perusahaan <i>High Profile</i> yang tercatat di Bursa efek Indonesia tahun 2008-2010
Data yang diteliti	<i>Annual Report 2008-2010</i>
Alat Uji Statistik	Model regresi berganda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik IBI KKG (Kantor Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Dependen	<i>Corporate social responsibility disclosure</i>
Variabel Independen	Profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham public, dewan komisaris, pengungkapan media.
Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR, dewan komisaris dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas kepemilikan saham public dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

3. Ikhtisar penelitian Rizkia Anggita Sari

Nama Peneliti	Rizkia Anggita Sari
Judul	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Tahun Penelitian	2012
Objek Penelitian	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2008-2010
Data yang diteliti	<i>Annual report</i> 2008-2010
Alat Uji Statistik	Model regresi berganda
Variabel Dependen	<i>Corporate social responsibility disclosure</i>
Variabel Independen	Tipe Industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan perusahaan.
Hasil Penelitian	Variabel tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

4. Ikhtisar penelitian Carmelo Reverte

Nama Peneliti	Carmelo Reverte
Judul	<i>Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms</i>
Tahun Penelitian	2009
Objek Penelitian	<i>Spanish firms</i> yang terdaftar di <i>Madrid Stock Exchange</i> dan <i>IBEX35 index</i>
Data yang diteliti	<i>Annual report</i> 2005-2006
Alat Uji Statistik	Model regresi berganda
Variabel Dependen	<i>Corporate social responsibility disclosure</i>
Variabel Independen	Ukuran perusahaan, sensitivitas industri, profitabilitas, struktur kepemilikan, pengungkapan media, <i>international listing</i> dan <i>leverage</i> .
Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan, sensitivitas industri dan pengungkapan media berpengaruh terhadap indeks pengungkapan CSR perusahaan. Sedangkan profitabilitas perusahaan, struktur kepemilikan, <i>international listing</i> , <i>leverage</i> , tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada indeks pengungkapan CSR.

Sumber: berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek tahun 2013-2015 yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, *media exposure*.

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Ukuran perusahaan merupakan faktor sering digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Dikaitkan dengan teori agensi seperti yang dinyatakan Sembiring (2005) semakin besar perusahaan maka semakin besar juga biaya keagenan perusahaan tersebut karena perusahaan besar banyak menggunakan sumber daya sehingga menjadi sorotan publik. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut *principal* mendorong agen untuk melakukan tanggung jawab sosial dan melaporkannya demi menambah nilai perusahaan dimata investor yang akan datang walaupun yang sudah ada dan mempertahankan eksistensi dari perusahaan tersebut. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil (Anggraini, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Benardi, dkk (2009) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Benardi, dkk (2009), peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang positif antara ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial.



2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya atas aset yang dipakai. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh return yang memadai dengan resikonya.

Berdasarkan teori *stakeholder*, profitabilitas yang tinggi memicu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepentingan dan harapan mereka akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk implementasi perusahaan untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan cenderung semakin besar. Haryanto dan Yunita (2008) menemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara profitabilitas dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sesuai dengan hasil penelitian Haryanto dan Yunita (2008), peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh positif yang antara profitabilitas dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan baik berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Pada dasarnya semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring, serta untuk membuat manajer patuh akan kebijakan dan aturan yang ada. Hal tersebut berbeda dengan yang ada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam *agency problem* (masalah keagenan) yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris semakin sulit dalam menjalankan perannya hal itu dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, dan juga hal ini akan berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap manajemen (Ujiyantho, 2007). Penelitian Nur dan Priantinah (2012) juga menjelaskan bahwa dewan komisaris yang berjumlah besar menjadi kurang efektif karena dominasi anggota dewan komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan. Apabila dewan komisaris berjumlah kecil maka perusahaan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan dewan komisaris yang berjumlah besar. Alasan yang bisa menjelaskan ini dikarenakan dewan komisaris yang berjumlah kecil akan memiliki efektivitas yang baik terhadap pengawasan manajemen perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012), peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara ukuran dewan komisaris dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Sari (2012) *Leverage* mencerminkan risiko keuangan perusahaan karena dapat menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui risiko tak tertagihnya suatu utang. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi sehingga menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Berdasarkan teori akuntansi positif, perusahaan (manajer) yang memiliki rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode dan taksiran akuntansi yang menguntungkan yaitu yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan laba, hal tersebut biasanya cenderung melanggar perjanjian utang.

Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial (Belkaoui dan Kaprik, 1989).

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti sesuatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan *debtholder*. Nur dan Priantinah (2012) menemukan pengaruh yang negatif dan signifikan antara profitabilitas dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Nur dan Priantinah (2012), peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara leverage dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

5. Pengaruh *Media Exposure* Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Media adalah sumber daya pada informasi lingkungan. Pengkomunikasian tanggung jawab sosial perusahaan melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat sesuai dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan perusahaan berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai media. Media internet (*web*) merupakan media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang mulai meningkat (Plorensia dan Hardiningsih, 2015). Harapan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan melalui media internet adalah agar masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



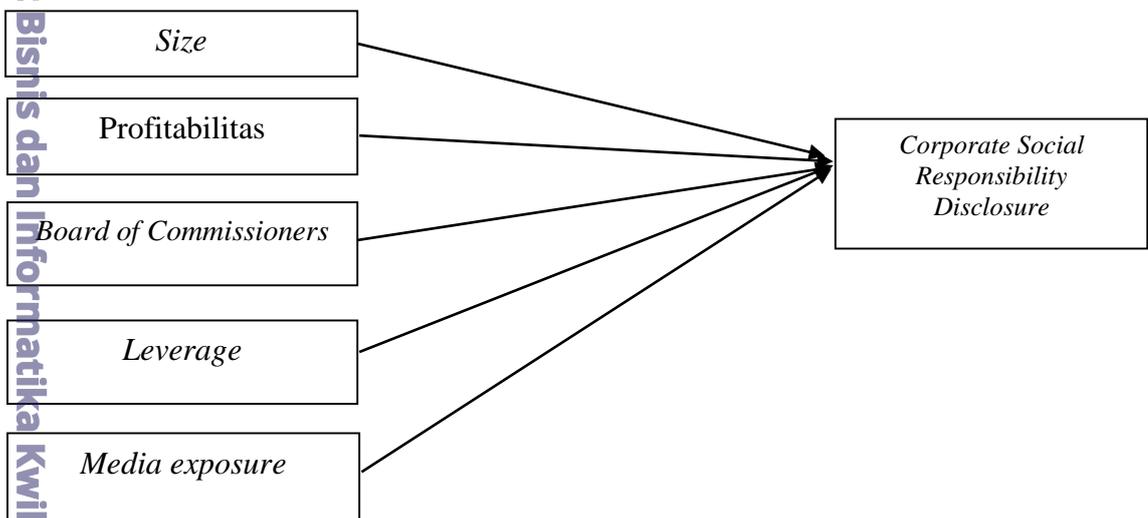
perusahaan akan dikenal memiliki nilai dan norma sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Penelitian oleh Plorensia dan Hardiningsih (2015) yang meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara *media exposure* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Aulia (2010) yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui media perusahaan memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, hasil penelitian tersebut menandakan bahwa pengungkapan informasi melalui media perusahaan (*website*) mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tindakan manajemen untuk diterima dimasyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Plorensia dan Hardiningsih (2015), peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *media exposure* dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berikut ditampilkan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

Ha₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.

Ha₂ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.

Ha₃ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang perusahaan manufaktur.

Ha₄ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.

Ha₅ : *Media exposure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.